



LAPORAN KINERJA (LKJ)

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUKABUMI
2023



Tanpa Lompatan Imajinasi atau Mimpi, Kita Kehilangan Kegembiraan akan Berbagai Kemungkinan. Mimpi, Bagaimana Pun Juga Adalah Sebuah Bentuk Perencanaan.
-Abraham Lincoln

   @KaMiTeVe

#pemkab_sukabumi_diskominfo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Karunia-Nya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dapat menyelesaikan semua program dan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023. Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan gambaran mengenai program kegiatan dan kinerja pada setiap Tahun Anggaran berjalan, maka kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukabumi menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dengan sistematisa sebagaimana yang telah diilustrasikan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini masih banyak terdapat kekurangan, hal ini akan dijadikan bahan koreksi kami lebih lanjut di masa - masa yang akan datang.

Demikian untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya pada kita semua. Amin.

Sukabumi, 02 Januari 2024

Pt. KEPALA DINAS,



HERI SUBANDI, S.IP., M.Si

Pembina IV/a

NIP. 198004252008011003

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Berdasarkan IKU RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Tahun 2023			Capaian s.d. Akhir Periode RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian	
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN								
Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.								
	Indeks kepuasan layanan infrastruktur		Poin	3.00	2.70			
T3: Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas.	SS13. Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	%	100.00	82.12	82.12	100	82.12

Indikator kinerja cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah diukur dengan jumlah wilayah blankspot internet (*Zero Blankspot*) sebanyak 69 titik/desa dengan capaian realisasi yang telah tertangani sebanyak 317 titik/desa.

B. Capaian Kinerja Berdasarkan Proyek Prioritas Pembangunan Tahun 2023

PROYEK PRIORITAS TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI							
PROYEK PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN 2023 (%)	
						K	Rp.
Zero Blank Spot Internet Area	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bandwich Jaringan	Titik (Desa)	100.00	97.89
Digitalisasi pelayanan publik (Desa dan Kabupaten)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berupa aplikasi layanan masyarakat dalam bentuk android melalui aplikasi DESA KaMi.	Aplikasi	100.00	99.75
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Berupa Pelayanan Publik dengan pemanfaatan TTE	PD	100.00	99.96
Integrasi sistem pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berupa aplikasi layanan dengan nama layanan kami ada & WA Bot	Aplikasi	100.00	98.09

Indikator kinerja proyek prioritas Tahun Anggaran 2023 diukur dengan tiga indikator sebagai berikut :

1. Penanganan Zero Blankspot dengan target 23 titik/desa, realisasi 23 titik/desa.
2. Digitalisasi Pelayanan Publik (Desa dan Kabupaten) dengan target 1 aplikasi Desa Kami, realisasi 1 Aplikasi Desa Kami dan pada tahun 2023 ditunjang kembali oleh layanan desa yang menggunakan pemanfaatan tanda tangan elektronik.
3. Integrasi Sistem Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Berbasis Digital dengan target 1 Aplikasi Kami Ada, realisasi 1 Aplikasi Kami Ada, serta ditunjang dengan

aplikasi tambahan yaitu aplikasi Wa BOT.

C. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 – 2026

Laporan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas (Esselon II)
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%
Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	%	55	57	103
Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	%	60	63	105
Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	%	49	49	100

D. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Laporan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas (Esselon III)
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	%	40	3,973,171,000	69	3,944,465,982	172%	99.27
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses TIK yang tersedia	%	48	2,704,143,000	49	2,671,237,037	102%	98.78
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK	Persentase Data Statistik Sektoral yang di update secara berkala	%	49	383,810,000	49	381,892,000	100%	99.50

	SEKTORAL								
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi	%	48	375,225,600	81	372,106,953	168%	99.16
X	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	75,196,000	100	75,196,000	100	100
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	5,719,923,351	100	5,580,549,680	100	97.56
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	35,000,000	100	35,000,000	100	100
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	21,312,100	100	21,312,100	100	100
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	475,043,600	100	450,196,436	100	94.76
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	228,120,000	100	224,901,000	100	98.58
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	3,365,083,200	100	3,336,685,731	100	99.15
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	1,047,896,500	100	1,018,898,970	100	97.23

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Cascading Kinerja DKIP	3
1.5 Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
1.6 Isu Strategis	6
1.7 Rekomendasi CHE SAKIP Tahun 2022	8
1.8 Landasan Hukum	9
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	12
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	16
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	20
2.4 Perjanjian Kinerja	29
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	30
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2023	32
3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan Kinerja	42
3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	44
3.5 Inovasi	45
3.6 Kinerja Lintas Sektor	47
BAB. IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Rekomendasi	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

BAB I berisi :

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Tugas Pokok dan Fungsi
4. Cascading Kinerja
5. Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
6. Isu-Isu Strategis
7. Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022
8. Landasan Hukum

Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu suatu pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi dituntut untuk dapat mewujudkan *good governance* tersebut dengan baik mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR

Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 serta . Salah satu inti pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang dituntut juga untuk menyampaikan akuntabilitas kinerjanya melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Sehingga sasaran, program, indikator dan target kinerja Dinas pada Laporan Kinerja Tahun 2023 ini mengacu kepada sasaran, program, indikator dan target kinerja yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-Tahun 2026.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika ini adalah sebagai bahan pelaporan tahunan dari kinerja Dinas tersebut dengan berpedoman pada RPJMD, Renstra, Renja, dan Perjanjian, dengan tujuan memberi informasi tentang hasil Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, maka Diskominfoosan menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

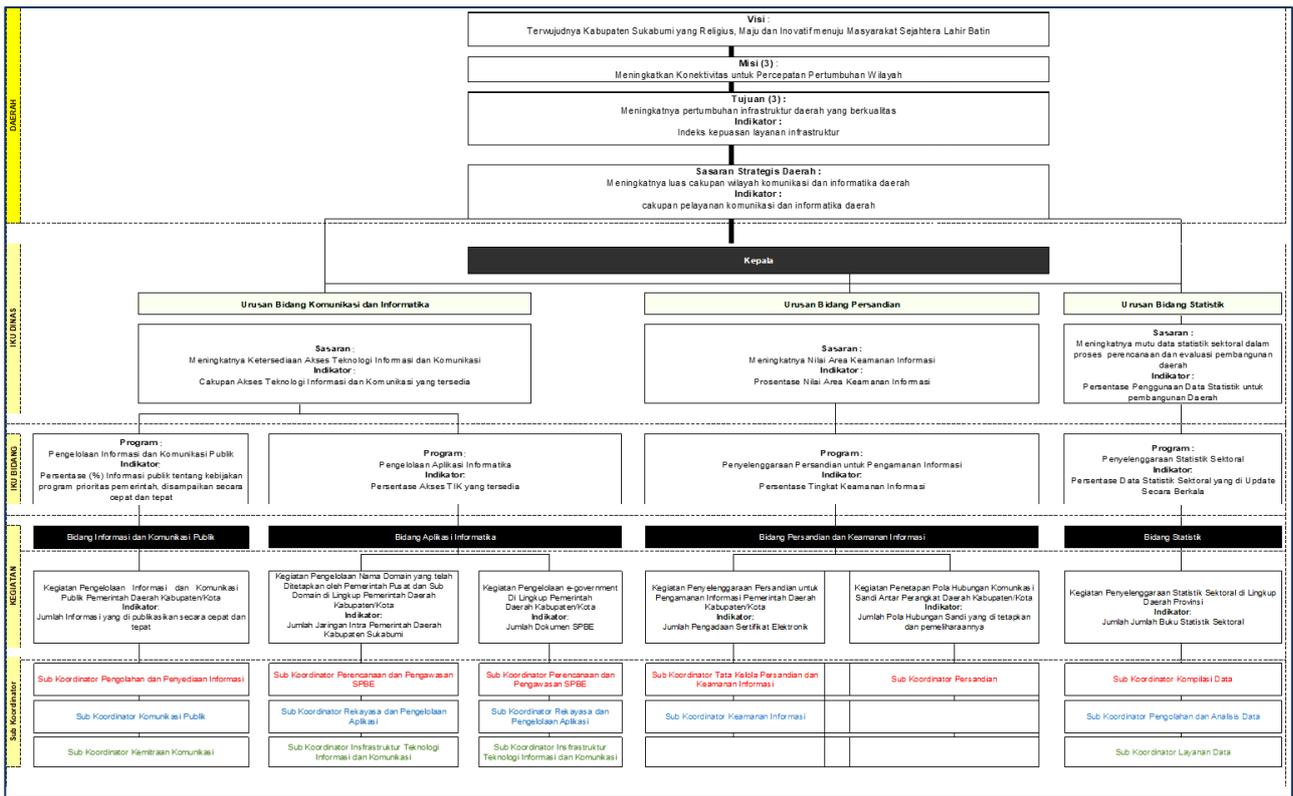
Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian serta Statistik;
- c. Pemantauan pelaksanaan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; Bidang Aplikasi Informatika; Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

- Bidang Statistik; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dinas;
 - e. Penyelenggaraan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
 - f. Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan nama domain dan subdomain daerah kabupaten sukabumi;
 - h. Penyelenggaraan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik) daerah kabupaten;
 - i. Penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat;
 - j. Penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik daerah kabupaten;
 - k. Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi daerah kabupaten;
 - l. Penyelenggaraan statistik sektoral daerah kabupaten;
 - m. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
 - n. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
 - o. Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugas;
 - q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

1.4. CASCADING KINERJA DKIP

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang ditetapkan Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :



1.5. PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara peta proses bisnis dan struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi tersaji dalam gambar berikut :

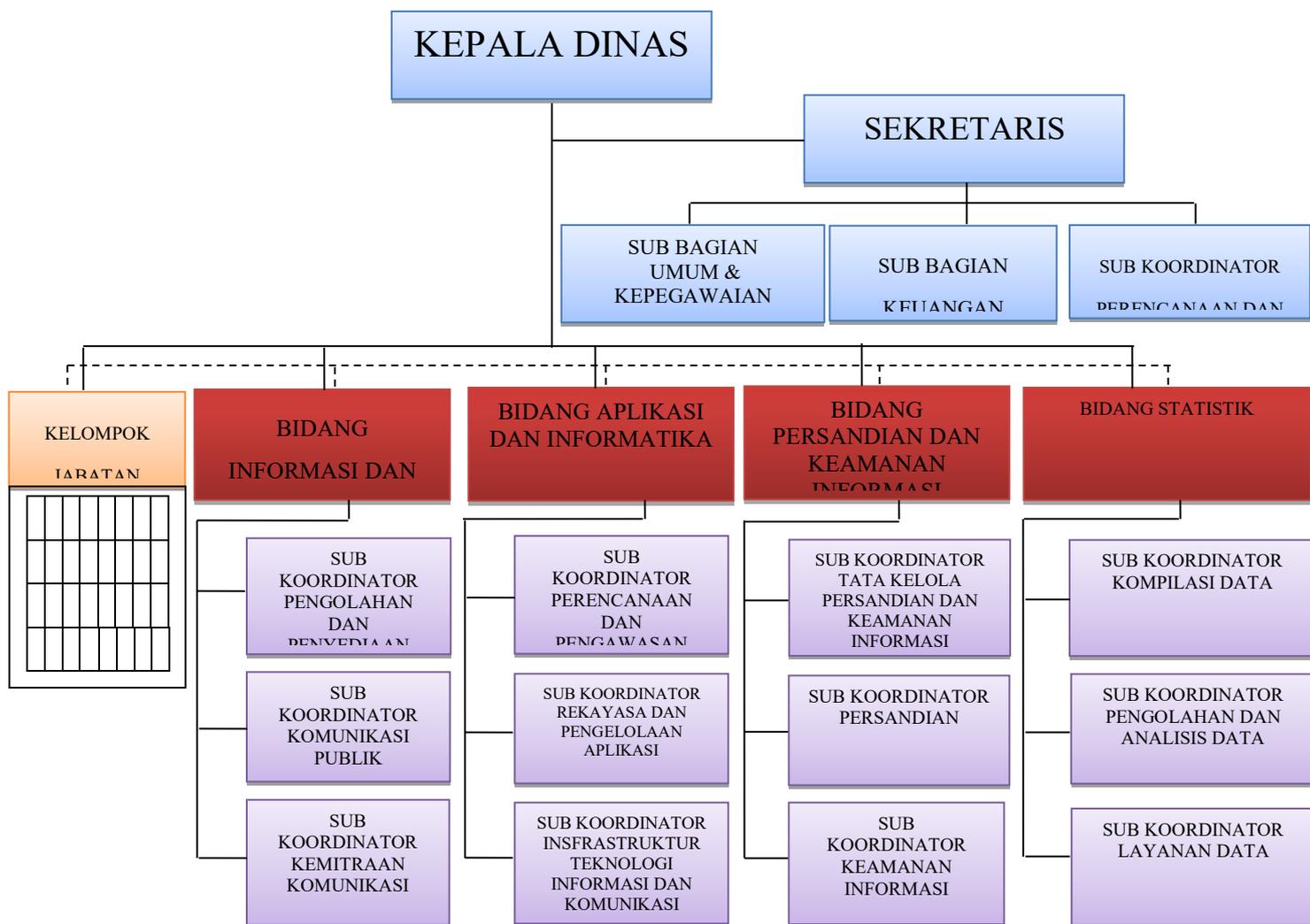


Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, maka struktur organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penyediaan Informasi;
 2. Sub Koordinator Komunikasi Publik; dan
 3. Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi.
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengawasan SPBE;
 2. Sub Koordinator Rekayasa dan Pengelolaan Aplikasi; dan
 3. Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
 2. Sub Koordinator Persandian; dan
 3. Sub Koordinator Keamanan Informasi;
- f. Bidang Statistik, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Kompilasi Data;
 2. Sub Koordinator pengolahan dan Analisis Data; dan
 3. Sub Koordinator Layanan Data.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi



BUPATI SUKABUMI

TTD

MARWAN HAMAMI

————— GARIS KOMANDO
 - - - - - GARIS KOORDINASI

1.6. ISU STRATEGIS

Isu Strategis Dinas dengan mengidentifikasi permasalahan yang di hadapi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan, antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan

- daya saing ekonomi daerah.
2. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*e-government*).
 3. Kualitas jaringan telekomunikasi belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga masih terdapat 115 titik yang berstatus *blank spot area*.
 4. Belum optimalnya keterisian data SIPD, dimana ditargetkan terisi 70 persen tetapi belum terealisasi.
 5. Masih belum meratanya akses TIK yang tersedia sebagai fasilitas penunjang pelayanan publik.
 6. Masih rendahnya kapasitas masyarakat terhadap alat teknologi informasi sebagai faktor pendukung dalam era transformasi digital.
 7. Masih rendahnya tingkat kompetensi dan kualifikasi pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
 8. Sarana prasarana fasilitas dilingkungan dinas masih terbatas.
 9. Masih belum meratanya pelayanan informasi ke pada masyarakat.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, berikut adalah faktor pendorong dan penghambat pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, diantaranya yaitu :

- a. Faktor Pendorong :
 - Tersedianya sumber daya manusia yang masih produktif dan berpotensi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - Mulai berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menunjang pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Faktor Penghambat :
 - Tidak tersedianya anggaran yang cukup memadai;
 - Luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topologi perbukitan menjadi permasalahan dalam pemasangan infrastruktur penunjang akses internet;
 - Fasilitasi Penunjang Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.

Dengan melalui telaahan dari Visi dan Misi Program Kepala Daerah dengan pandangan bahwa Pemerintah Kabupaten merumuskan perencanaan Pembangunan dengan merepresentasikan keinginan Kepala Daerah terpilih selama

masa kepemimpinannya bahwa Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang **RELIGIUS, MAJU, dan INOVATIF Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir**”

Hal tersebut pada intinya adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan Pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam pelaksanaan tugas perlu menanamkan kejujuran kedisipinan, keterbukaan, tanggungjawab sehingga dapat memberikan laporan yang akuntabel, dengan Misi Bupati Sukabumi di Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam RPJMD , yaitu Misi ke 3 :

**“MENINGKATKAN KONEKTIFITAS UNTUK PERCEPATAN
PERTUMBUHAN WILAYAH”**

1.7. REKOMENDASI LHE SAKIP TAHUN 2022

No	Saran Rekomendasi	Tindak Lanjut
a.	<p>Perencanaan Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi dapat disesuaikan dengan kondisi triwulanan yang berjalan, apabila terdapat target yang tidak tercapai, maka dibuat rencana aksi perbaikannya. 2. Dibuatkan penjelasan informasi yang menunjukkan hubungan kinerja, strategis, kebijakan, bahkan aktivitas atara bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). 3. Menyajikan undangan, daftar hadir, notulensi dan foto kegiatan atas bukti keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan 	<p>Perencanaan Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi telah disesuaikan 2. Crosscutting Sudah dibuatkan 3. Eviden Telah Tersedia
b.	<p>Pengukuran Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala dan berjenjang. 2. Adanya dokumentasi secara administrasi yang melibatkan pimpinan sebagai pengambil Keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja yaitu undangan, daftar hadir, notulensi dan foto kegiatan 3. Menyajikan laporan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkala (triwulan) 	<p>Pengukuran Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Data Kinerja Selalu dilakukan berkala 2. Dokumen administrasi telah tersedia 3. Laporan Monitoring evaluasi secara berkala telah dilaksanakan

	4. Dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	4. Pemantauan kinerja telah dilakukan secara berjenjang
c.	<p>Pelaporan Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuatkan dokumen laporan kinerja secara triwulan dan berjenjang 2. Laporan kinerja direviu secara berkala dan berjenjang. 3. Menyajikan undangan, daftar hadir, notulensi, foto kegiatan keterlibatan pimpinan atas capaian kinerja secara berkala. 4. Dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional. 	<p>Pelaporan Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dibuatkan dokumen laporan kinerja secara triwulan 2. Laporan kinerja telah direviu secara berkala 3. Eviden telah tersedia 4. Perbandingan kinerja telah membandingkan antara level daerah dengan nasional/kabupaten
d.	<p>Evaluasi Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang mencakup sekurang kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjut hasil evaluasi secara berkala 2. Menyajikan Laporan Evaluasi internal unit secara berkala dan berjenjang 3. Tim penyusun dan/atau yang mengevaluasi Akuntabilitas Internal dapat diusulkan untuk memperoleh pelatihan SAKIP 4. Perencanaan Kinerja menyajikan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya dan agar ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi kinerja 5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). 6. Dokumentasi tindak lanjut atas langkah langkah evaluasi internal, diantaranya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, evaluasi program, evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi. 	<p>Evaluasi Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Saran dan Rekomendasi telah ditindak lanjuti

1.8. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 mengacu pada :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara

- yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 8. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 9. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 12. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 , tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi;
 18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 110 Tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah/Laporan Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
22. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 78 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.
23. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Utama.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PD

BAB II berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan kerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan di dasarkan kepada sasaran strategis Dinas Tahun 2021 s/d 2026.

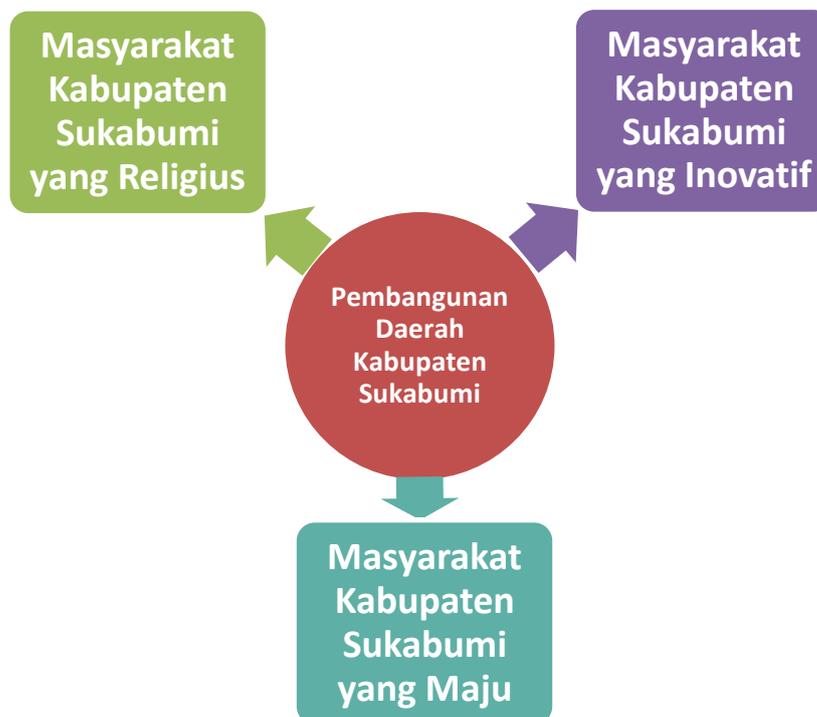
Adapun Sasaran Strategis Dinas Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi yang menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang ditetapkan dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang RELIGIUS, MAJU, dan INOVATIF Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir

Visi diatas mengandung tiga elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi Periode 2021-2026 yakni **Religius, Maju dan Inovatif**. Dari dua elemen tersebut maka dirrtelaah bahwa Kepala Daerah ingin membangun masyarakat Kabupaten Sukabumi yang sejahtera lahir dan batin dengan tetap mempertahankan moral religiusitas, sumber daya manusia yang berdaya saing dengan inovasi – inovasi yang baru. Adapun hubungan antar elemen visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi tergambar pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Gambar Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan
Kabupaten Sukabumi



Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 tersebut, maka dirumuskan Misi Kabupaten Sukabumi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir mengenai maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi ini bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dicapai. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the Choose Track*) bagi Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *Stakeholder* pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (Pemerintah Daerah) harus dijaga oleh segenap *Stakeholders*

Pembangunan. Berdasarkan identifikasi Visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan
3. **Meningkatkan Konektifitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah**

Sesuai dengan cascade kinerja, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah. Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya untuk mencapai visi '**Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin**', misi yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik adalah misi ke-3 yakni '**Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah**' dengan sasaran daerah yaitu '**Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah**'

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2 berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Renstra) Pelayanan Dinas Kominfo
2021 – 2026 (Eselon II)

Tujuan	Sasaran PD	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatkan Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas	1.1. Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	14	40	55	70	85	100

		yang tersedia						
	1.2. Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	32	46	60	73	86	100
	1.3. Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	16	32	49	66	83	100

Tabel 2.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Renstra) Pelayanan Dinas Kominfo
2021 – 2026 (Eselon III)**

Tujuan	Sasaran PD	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Meningkatnya Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas	2.1. Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Akses TIK yang tersedia	14	31	48	65	83	100
		Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	10	20	40	60	80	100
	2.2. Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Tingkat Keamanan	13	31	48	65	82	100

	Informasi						
2.3. Meningkatkan mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	16	32	49	66	83	100

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi dengan efektif dan efisien. Strategis dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung capaian pembangunan. Salah satu point penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta peningkatan luas cakupan akses teknologi informasi dan komunikasi sehingga peningkatan percepatan pertumbuhan konektivitas wilayah dalam terwujud

Rumusan Strategi menunjukkan Langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*Value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan Langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa Langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah

(khususnya pemerintahan daerah)

4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*Key Success Factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi, dan;
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD

Adapun rumusan strategi pembangunan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.

1. MISI 3

Meningkatkan Konektifitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah

Tabel 2.3
Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Misi 3
Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Tujuan No :	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
3	Meningkatnya Pertumbuhan Insfrastruktur Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Luas Cakupan Wilayah Komunikasi dan Informatika	<p>Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian</p> <p>Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika</p> <p>Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung pencakupan area</p> <p>Peningkatan Kualitas Informasi Publik</p> <p>Meningkatkan pelaksanaan persandian untuk keamanan informasi</p>

Tujuan No :	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu data statistik sectoral

Sumber : Dokumen RPJMD 2021-2026

Pencapaian sasaran pembangunan dinas yang mengacu kepada RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai Prioritas Pembangunan (*Strategi Focused Organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah di gambarkan diatas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Arah kebijakan merupakan instrument langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD, adapun fokus atau tema pembangunan Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi
Tahun 2022 – 2026



Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama dari rumusan arah kebijakan pembangunan wilayah untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Adapun hasil dari perumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin			
Misi : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian 2. Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika 3. Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung pencakupan area 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika diinstansi Pemerintah dalam rangka mendukung SPBE; 2. Mengembangkan Kapasitas SDM (IT) melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang 3. Meningkatkan jumlah tenaga IT sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang 4. Melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi maupun

		4. Peningkatan Kualitas Informasi Publik 5. Meningkatkan pelaksanaan persandian untuk keamanan informasi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu data statistik sectoral	penyediaan layanan jaringan public 5. Pembangunan dan Pengelolaan Kanal Informasi Pusat, Daerah dan Mitra 6. Peningkatan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan Daerah 7. Penyediaan Data Statistik Sektoral
--	--	--	---

2.3. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3,973,171,000	3,944,465,982	99	40%	69%	172
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	3,973,171,000	3,944,465,982	99	2.280	2.372	104
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	577,179,000	569,799,448	98	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Pengelolaan Media	650,302,000	631,458,534	97	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Komunikasi Publik						
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	15,000,000	14,920,000	99	40 Orang	40 Orang	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2,730,690,000	2,728,288,000	99	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,704,143,000	2,671,237,037	98	48 %	49 %	102
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	449,618,500	440,321,327	97	23 Titik/Desa	23 Titik/Desa	100
Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	8,800,000	8,800,000	100	1 Domain	1 Domain	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra	440,818,500	431,521,327	97	1 Unit	1 Unit	100
Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	2,254,524,500	2,230,915,710	98	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-	76,524,400	76,144,400	99	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten						
Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	296,579,500	295,079,200	99	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	178,462,500	175,783,110	98	1 Unit	1 Unit	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	271,075,000	266,797,000	98	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	16,614,000	16,614,000	100	84 PD	84 PD	100
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	224,732,500	220,455,000	98	1 Unit	1 Unit	100
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	741,773,000	738,673,000	99	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	430,922,800	425,759,800	98	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	17,840,800	15,610,200	87	1 Dokumen	1 Dokumen	100
URUSAN STATISTIK						
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	383,810,000	381,892,000	99	49 %	49 %	100
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten	383,810,000	381,892,000	99	200 Buku	200 Buku	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	110,754,000	110,454,000	99	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	55,676,000	55,676,000	100	5 Orang	5 Orang	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	217,380,000	215,762,000	99	1 Dokumen	1 Dokumen	100
URUSAN PERSANDIAN						
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	375,225,600	372,106,953	99	48 %	81 %	168
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	375,225,600	372,106,953	99	255 SE	453 SE	177
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56,870,000	56,730,300	99	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000	79,976,700	99	1 laporan	1 Laporan	100
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	82,095,600	82,066,000	99	1 laporan	1 Laporan	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	20,000,000	20,000,000	100	84 PD	84 PD	100
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	136,260,000	133,333,953	97	1 JKS	1 JKS	100
Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten	136,260,000	133,333,953	97	84 PD	84 PD	100

Anggaran pencapaian sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi tahun 2023 bersumber dari APBD. Pendanaan penunjang langsung urusan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 6.677.314.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.390.868.185,00 atau sebesar 95 %. Pada urusan Persandian pendanaan sebesar Rp 375.225.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 372.106.953,00 atau sebesar 99 %. Kemudian pada urusan Statistik memiliki pendanaan sebesar Rp 383.810.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 381.892.000,00 atau sebesar 99 %.

Tabel 2.5
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Pendukung
Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	10,967,574,751	10,742,739,917	98	100%	100%	100
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.196.000	75.196.000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,196,000	27,196,000	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4,000,000	4,000,000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,000,000	4,000,000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,000,000	5,000,000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5,000,000	5,000,000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000	30,000,000	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,719,923,351	5,580,549,680	97	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,681,923,351	5,542,549,680	97	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25,000,000	25,000,000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	3,000,000	3,000,000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Akhir Tahun SKPD						
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7,000,000	7,000,000	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,000,000	3,000,000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	35,000,000	35,000,000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000	5,000,000	100	1 Laporan	1 Laporan	100
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30,000,000	30,000,000	100	1 Laporan	1 Laporan	100
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21,312,100	21,312,100	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	11,500,000	11,500,000	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9,812,100	9,812,100	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	475,043,600	450,196,436	94	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	256,034,600	253,443,380	98	1 Paket	1 Paket	100
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,000,000	49,606,830	99	1 Paket	1 Paket	100
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,575,000	3,575,000	100	1 Laporan	1 Laporan	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156,124,000	134,261,226	85	1 Laporan	1 Laporan	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9,310,000	9,310,000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	228,120,000	224,901,000	98	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228,120,000	224,901,000	98	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.770.491.100	2.756.239.934	99	100 %	100 %	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,051,160,000	1,023,431,611	97	1 Laporan	1 Laporan	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	49,680,000	99	1 Laporan	1 Laporan	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,047,896,500	1,018,898,970	97	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	529,860,000	519,898,125	98	18 Unit	18 unit	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	289,340,000	271,699,781	93	13 Unit	13 Unit	100
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78,800,000	78,229,300	99	10 Unit	10 Unit	100
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaPemeliharaan/Rehabilitasi	149,896,500	149,071,764	99	1 Unit	1 Unit	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyas						

Anggaran pencapaian penunjang urusan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi tahun 2023 bersumber dari APBD. Pendanaan penunjang pendukung urusan Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik sebesar Rp 10,967,574,751 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10,742,739,917 atau sebesar 98 %.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

Adapun sebagai dasar komitmen dari melaksanakan Program dan kegiatan tersebut dibuatkan perjanjian kinerja kepada masing masing pemegang kegiatan agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya, dan mempunyai tugas dan kewenangan masing masing secara berjenjang, dengan menitik beratkan pada sasaran strategis, indikator kinerja dan komitmen target yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah

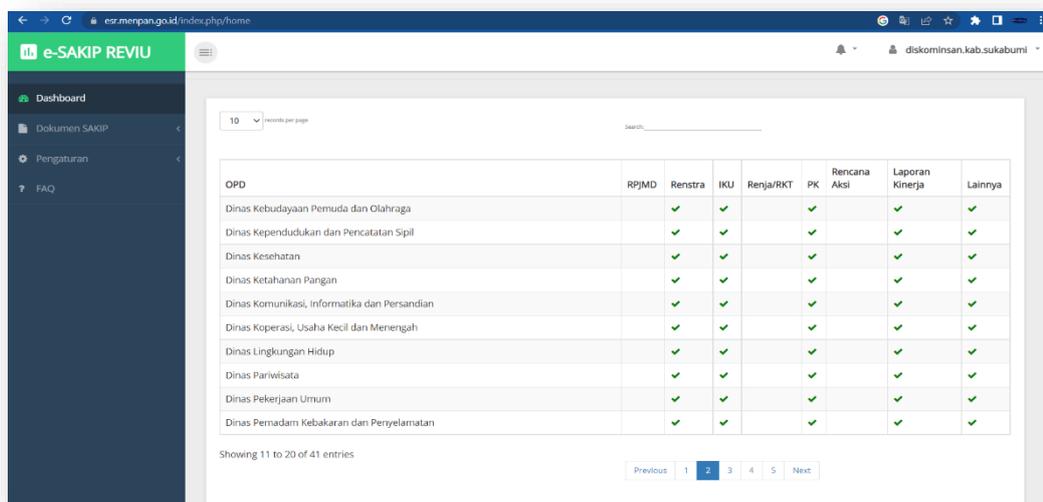
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	%	55	Triwulan I	10
					Triwulan II	10
					Triwulan III	20
					Triwulan IV	15
2.	Meningkatnya Nilai Area Keamanan	Prosentase Nilai Area	%	60	Triwulan I	15
					Triwulan II	15

	Informasi	Keamanan Informasi			Triwulan III	15
					Triwulan IV	15
3.	Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	%	49	Triwulan I	10
					Triwulan II	10
					Triwulan III	15
					Triwulan IV	14

2.3. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi adalah aplikasi yang telah disediakan oleh kemenpan RB <https://esr.mempan.go.id>.

Gambar 2.2
Sistem Aplikasi E-SAKIP Reviu

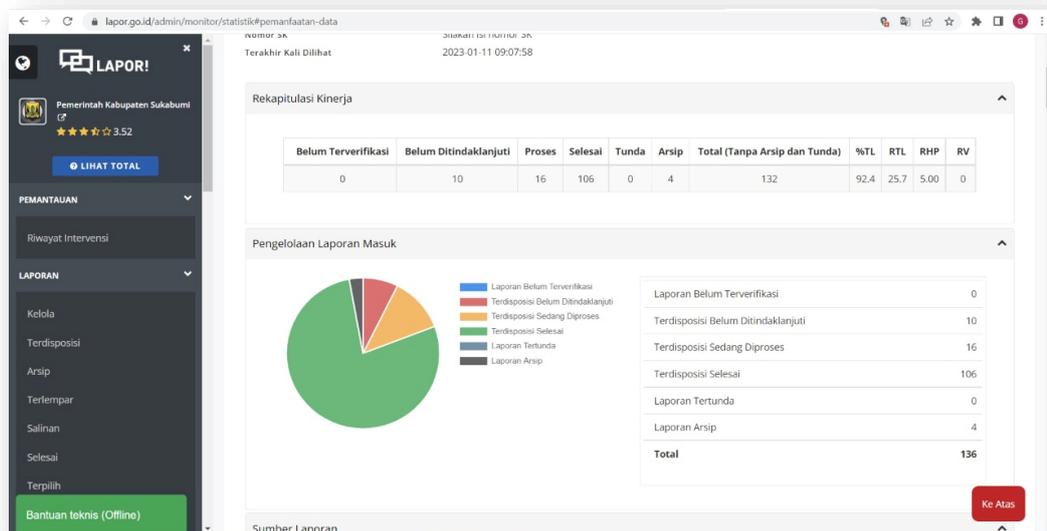


2. Instrumen pendukung penilaian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh bagian PPID Dinas Komunikasi Informatika & Persandian Kabupaten Sukabumi melalui Website PPID <https://ppid.sukabumikab.go.id/> dan aplikasi E-lapor

Gambar 2.3
Website PPID Pemda Kabupaten Sukabumi



Gambar 2.4
Aplikasi E-Lapor Kabupaten Sukabumi



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI TAHUN 2023

BAB III Berisi :

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2023
2. Inovasi

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menjelaskan capaian kinerja organisasi daerah, yang berisi penyajian capaian kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategi Kominfo yang disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021 sebelumnya, adapun pengukuran dilakukan pada dasarnya pada tahun 2022 dengan membandingkan antara realisasi dengan target dengan melihat dari target akhir renstra pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010. Adapun pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

TABEL 3.2
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD 2021-2026
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Base Line 2021	Tahun 2023			Kriteria/ Kode
						Target	Realisasi	Capaian	
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN									
Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.									
T3: Meningkatkan pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Poin	3.00		2.70				
	SS13. Meningkatkan luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	%	100	82.12	82.12	82.12	100	Sangat Baik

Adapun analisis kinerja dari indikator kinerja sasaran meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah adalah terdapat peningkatan dari *base line* kinerja awal tahun 2021 sebesar 70.20 % atau sebanyak 271 titik/desa dari total 386 titik/desa yang tertangani *blankspot*, kemudian pada tahun anggaran 2022 di targetkan meningkat sebanyak 23 titik/desa yang tertangani *blankspot* dengan realisasi kinerja sebesar 100% kemudian pada tahun anggaran 2023 di targetkan meningkat sebanyak 23 titik/desa yang tertangani *blankspot* dengan realisasi kinerja sebesar 100% sehingga akumulasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 317 titik/desa atau sebesar 82.12% dengan kriteria penilaian “**Sangat Baik**”.

TABEL 3.3
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PROYEK PRIORITAS TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI

Proyek Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Capaian 2023 (%)		Kriteria
						K	Rp.	
<i>Zero Blank Spot Internet Area</i>	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	<i>Bandwich Jaringan</i>	Titik (Desa)	100	97.89	Sangat Baik
Digitalisasi pelayanan publik (Desa dan Kabupaten)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berupa aplikasi layanan masyarakat dalam bentuk android melalui aplikasi DESA KaMi.	Aplikasi	100	99.75	Sangat Baik
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Berupa Pelayanan Publik dengan pemanfaatan TTE	PD	100.00	99.96	Sangat Baik
Integrasi sistem pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berupa aplikasi layanan dengan nama layanan KaMi Ada	Aplikasi	100	99.96	Sangat Baik

Analisis ketercapaian capaian kinerja berdasarkan target proyek prioritas tahun anggaran 2023 pada tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

1. Proyek Prioritas penanganan *Zero Blank Spot Internet Area* pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebanyak 23 titik/desa area *blankspot*, dengan realisasi pencapaian kinerja sebesar 100 % dan mendapatkan predikat kriteria “**Sangat Baik**”.
2. Proyek Prioritas Digitalisasi Pelayanan Publik (Desa dan Kabupaten) pada tahun anggaran 2023 ditargetkan terealisasi melalui pembangunan Open SID desa, namun pada perjalanannya mengalami hambatan dikarenakan perlu adanya pergeseran

anggaran untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan Gerakan menuju *smart city* sesuai dengan instruksi dari kemenkominfo, kemudian pada anggaran perubahan indikator kinerja digitalisasi pelayanan publik (Desa dan Kabupaten) dapat terealisasi melalui pembangunan sistem aplikasi Desa KaMi (Desa kabupaten Sukabumi) sebanyak satu buah dengan realisasi pencapaian kinerja sebesar 100 % dan pada tahun 2023 ditunjang kembali oleh layanan desa yang menggunakan pemanfaatan tanda Tangan Elektronik mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.

3. Proyek Prioritas Integrasi Sistem Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Berbasis Digital pada tahun anggaran 2023 ditargetkan terealisasi melalui pengembangan aplikasi BIMA SAKTI yang pada perjalanannya mengalami pemutakhiran menjadi aplikasi KaMi Ada (Kabupaten Sukabumi Ada) dengan realisasi pencapaian kinerja sebesar 100 % serta ditunjang dengan aplikasi tambahan yaitu aplikasi Wa BOT dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.

Tabel 3.4

**Laporan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas (Esselon II)
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kriteria
Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	%	55	57	103	Sangat Baik
Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	2 Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	%	60	63	105	Sangat Baik
Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan	3 Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	%	32	32	100	Sangat Baik

dan evaluasi pembangunan daerah									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.5
Laporan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas (Esselon III)
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)		Kriteria
			Kinerja	Rp	Kinerja	RP	Kinerja	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	%	40	3,973,171,000	69	3,944,465,982	172%	99.27	Sangat Baik
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses TIK yang tersedia	%	48	2,704,143,000	49	2,671,237,037	102%	98.78	Sangat Baik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang di update secara berkala	%	49	383,810,000	49	381,892,000	100%	99.50	Sangat Baik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi	%	48	375,225,600	81	372,106,953	168%	99.16	Sangat Baik
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	75,196,000	100	75,196,000	100	100	Sangat Baik
	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	5,719,923,351	100	5,580,549,680	100	97.56	Sangat Baik
	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang	%	100	35,000,000	100	35,000,000	100	100	Sangat Baik

	milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan								
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	21,312,100	100	21,312,100	100	100	Sangat Baik
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	475,043,600	100	450,196,436	100	94.76	Sangat Baik
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	228,120,000	100	224,901,000	100	98.58	Sangat Baik
	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	3,365,083,200	100	3,336,685,731	100	99.15	Sangat Baik
	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	1,047,896,500	100	1,018,898,970	100	97.23	Sangat Baik

Analisis ketercapaian capaian kinerja berdasarkan target indikator kinerja program (esselon III) tahun anggaran 2023 pada tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

1. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Informasi Publik Tentang Kebijakan program Prioritas Pemerintah Disampaikan Secara Cepat dan Tepat pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebanyak 2.280 Informasi, dengan realisasi pencapaian kinerja sebanyak 2.372 Informasi atau sebesar 104 % dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase akses TIK yang tersedia pada tahun anggaran 2023 ditargetkan dengan Jumlah Akses TIK yang tersedia terdiri dari 8 (0,5%) Website PD; 23 Penanganan Jaringan Blankspot Internet (3%); **Sistem Informasi Layanan Desa Tersedia 72 sudah selesai (3%)**; **Jaringan Private Admin Induk 15 vpn Tidak berlanjut (2%)**; **pusat data sudah selesai (12%)**; wifi publik gratis 11 (1%); jaringan intra pemda 16 (3%). **TOTAL : 7,5 %**, dengan realisasi pencapaian kinerja sebanyak Jumlah Akses TIK yang tersedia terdiri dari 8 (0,5%) Website PD; 23 Penanganan Jaringan Blankspot Internet (3%); **Sistem Informasi Layanan Desa Tersedia 381 (15%)**; **Jaringan Private Admin Induk 2 vpn (Tidak akan berlanjut 0.2%)**; **pusat data selesai (12%)**; wifi publik gratis 19 (2.5%); **jaringan intra pemda 16 (tidak tercapai 0%)**. **TOTAL : 6 %** , dengan

- akumulasi pencapaian indikator sebesar 102% dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.
3. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Data Statistik Sektorial Yang Diupdate Secara Berkala pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 49% terdiri dari 24 urusan wajib dan 7 urusan pilihan, dengan realisasi pencapaian kinerja sebesar 49 % atau sebesar 100 % dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.
 4. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Tingkat Keamanan Informasi pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebanyak 255 (3.73%) Sertifikat Elektronik; 23 SE (2.95%) yang telah menerapkan SMKI; 23 SE (2.95%) yang telah dilakukan Pentest; Nilai Index KAMI 90 (5.58%); Jumlah Jaring Komunikasi Sandi 1 JKS (3.33%) **Total : 18.54%**, dengan realisasi pencapaian kinerja sebanyak 453 (6.6%) Sertifikat Elektronik; 106 SE (13.5%) yang telah menerapkan SMKI; 56 SE (7.17%) yang telah dilakukan Pentest; **Nilai Index KAMI tidak ada peningkatan di tahun 2023 (0%)**; Jumlah Jaring Komunikasi Sandi 1 JKS (3.3%) **Total : 30.57**, dengan akumulasi pencapaian indikator sebesar 168% dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.
 5. Pencapaian Indikator Kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 100 %, dengan realisasi pencapaian kinerja sebesar 100 % atau sebesar 100 % dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.

Gambar 3.1
Pendampingan Pemasangan Jaringan Intra Internet (penanganan *blankspot area*) di Desa Bantargadung



Gambar 3.2
Pendampingan Pemasangan Jaringan Intra Internet (penanganan *blankspot area*) di Cikidang



Gambar 3.3
Laporan Kerjasama Pemberitaan/Penyebaran Informasi Melalui Media Online



Gambar 3.4
Rekapitulasi Sertifikat Elektronik untuk penggunaan tanda tangan elektronik yang telah terbit



Gambar 3.5
Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Tanda Tangan Elektronik Lingkup Dinas



Gambar 3.6
Kegiatan Penyusunan metadata Statistik Sektorial oleh Bapak Sekretaris DKIP, Sub Koordinator pada Bappelitbangda dan Kepala BPS Sukabumi



Gambar 3.7
Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral



3.2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

1. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

Permasalahan pencapaian kinerja yang tidak maksimal pada beberapa indikator pada setiap sasaran strategis dinas disebabkan karena beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. SDM yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik sangat terbatas;
- b. Cakupan pelayanan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik sangat luas;
- c. Kurang dukungan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik terutama dalam pengembangan jaringan blankspot;
- d. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercukupi anggarannya sehingga dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dioptimalkan.

Berbagai permasalahan tersebut di atas tidak mengurangi kinerja dinas dan dapat dicari solusi pemecahannya melalui :

- a. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan;
- b. Meningkatkan peranan Kominfo di wilayah serta peranan bidang Teknis dalam memberikan pelayanan di bidang kominfo di Kabupaten Sukabumi;
- c. Meningkatkan peran swasta, serta peranan dan dukungan masyarakat dalam pembangunan di bidang perhubungan dan kominfo melalui pelaksanaan kegiatan secara bersama sama atau diikuti sertakan;
- d. Menyampaikan kebutuhan Anggaran tidak terbatas pada APBD Kabupaten Sukabumi saja tetapi dapat bersumber dari pendanaan lain dan sumberdaya yang ada dengan pengoptimalan sebaik mungkin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan sesuai anggaran yang di tetapkan serta kesesuaian anggaran kas yang telah di tetapkan sehingga serapan anggarannya akan lebih baik dan pada akhir nya setiap program pembangunan yang di rencanakan berhasil dengan baik.

3.3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.6
Analisis Atas Efisiensi Capaian IKU Dinas
Penggunaan Sumber Daya (Hanya Untuk Capaian Kinerja ≥ 100%)

Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Efisiensi %	Target Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)		Kriteria
			Kinerja	Rp	Kinerja	RP	Kinerja	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	0.93	55	6,677,314,000	57	6,615,703,019	122%	99.07	Sangat Baik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	0.50	49	383,810,000	49	381,892,000	100%	99.50	Sangat Baik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	0.83	60	375,225,600	63	372,106,953	168%	99.16	Sangat Baik
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	0	100	75,196,000	100	75,196,000	100	100	Sangat Baik
	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	2.49	100	5,719,923,351	100	5,580,549,680	100	97.56	Sangat Baik
	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	0	100	35,000,000	100	35,000,000	100	100	Sangat Baik
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	0	100	21,312,100	100	21,312,100	100	100	Sangat Baik
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan	5.51	100	475,043,600	100	450,196,436	100	94.76	Sangat Baik

Perkantoran									
Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	1.43	100	228,120,000	100	224,901,000	100	98.58		Sangat Baik
Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkan toran	085	100	3,365,083,200	100	3,336,685,731	100	99.15		Sangat Baik
Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	2.77	100	1,047,896,500	100	1,018,898,970	100	97.23		Sangat Baik

Berdasarkan data tabel diatas capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan tetap memiliki sisa anggaran yang menjadi nilai efisiensi anggaran pada tahun 2023.

3.4. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Tabel 3.7
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran (Esselon II)
Tahun Anggaran 2023

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Satuan	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	57	103
		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	63	105
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			

Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	49	100
--	---	---	---	----	-----

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Keberhasilan Pencapaian ketiga Sasaran Strategis pada tabel diatas didukung melalui 4 program dan 6 kegiatan.

3.5. INOVASI

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur sipil negara untuk bergerak dinamis, kreatif dan berperan aktif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja pada tahun anggaran 2023 antara lain:

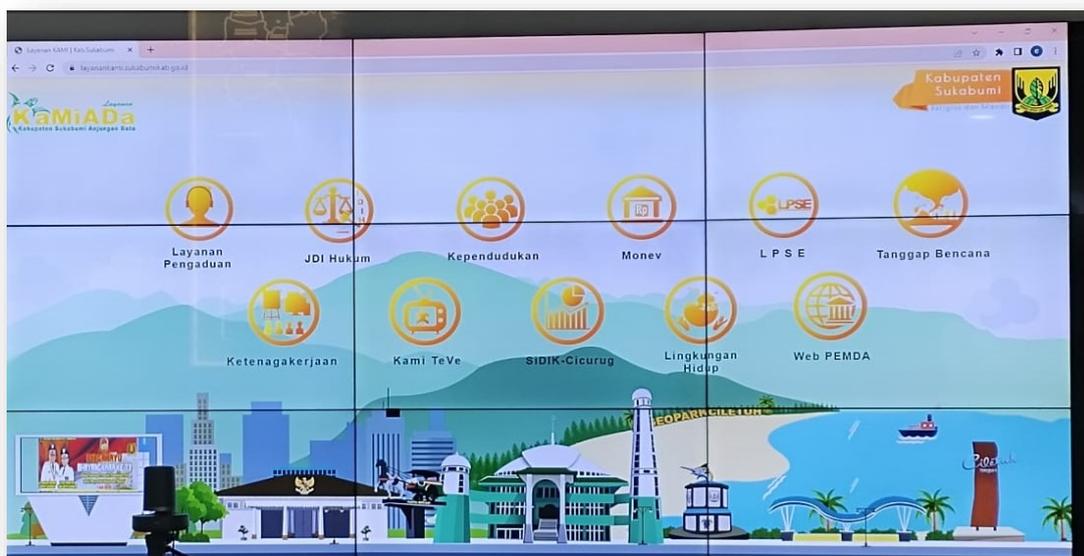
1. Pada era digitalisasi 4.0 dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah mulai di implementasikan pada kebutuhan administrasi pada internal pemeritah daerah. Salah satunya adalah dengan melalui penandatanganan dokumen secara digital atau Tanda Tangan Elektronik (TTE). Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber Sandi Negara (BSSN). Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi memanfaatkan TTE melalui Sistem aplikasi PANTER untuk menandatangani dokumen, tentunya hal ini lebih mudah, murah dan menghemat waktu.

Gambar 3.8
Aplikasi Panter untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE)

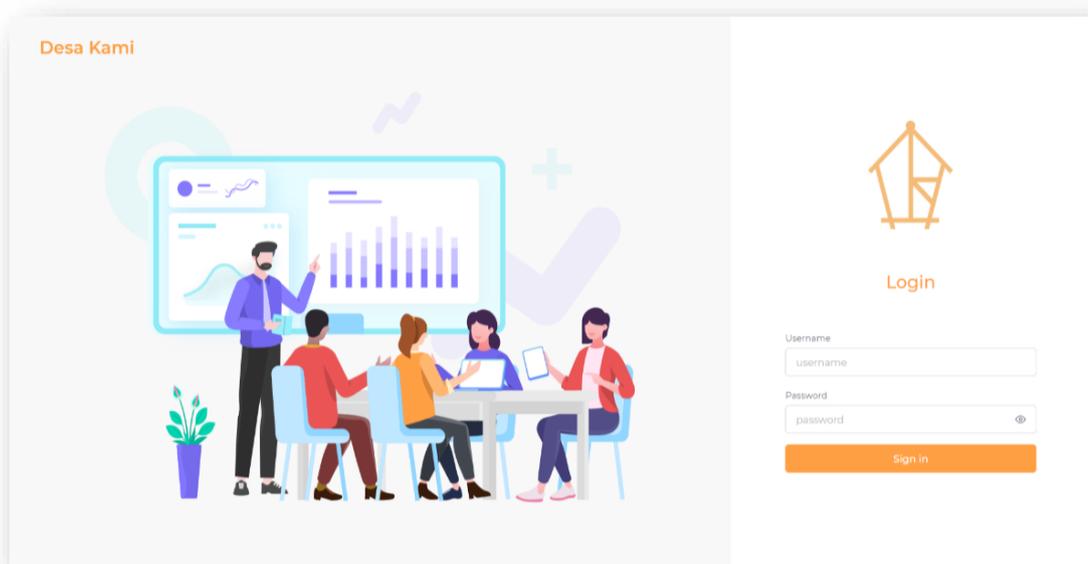


- 2. Dalam rangka pelayanan administrasi dan layanan publik yang optimal, maka dibutuhkan alat bantu berupa sistem aplikasi yang terintegrasi satu dengan lainnya yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan proses bisnis pemerintah daerah. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi telah membuat dua aplikasi yang dapat menjadi solusi agar terwujudnya pelayanan yang mudah, murah dan cepat, yaitu dengan aplikasi DesaKaMi dan Aplikasi KaMiAda

Gambar 3.9
Aplikasi KaMiAda



Gambar 3.10
Aplikasi DesaKaMi



3. Website PPID dan portal Kabupaten Sukabumi sebagai wadah dalam keterbukaan informasi publik Pemda tahun anggaran 2023

Gambar 3.11
Website PPID dan Portal Pemerintah Kabupaten Sukabumi



3.4. KINERJA LINTAS SEKTOR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi menginventarisasi Kinerja Lintas Sektor sebagai berikut :

TABEL 3.8
Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	OPD	Diskominfo sebagai koordinator dalam Penilaian SPBE	Indeks SPBE	84 Perangkat Daerah	Bagi OPD : 1. Mendukung pencapaian kinerja tujuan RPJMD Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif , Profesional dan Akuntabel. 2. Mendukung pencapaian kinerja program Pengelolaan Aplikasi Informatika. 3. Mendukung pencapaian kinerja keamanan informasi. 4. Mendukung pencapaian target kinerja data statistik sectoral. Bagi Kelompok Sasaran : 1. Menciptakan Pelayanan Pemerintah yang Mudah, Murah, Cepat serta Transparan.
		Instansi Lainnya	Perangkat Daerah pendukung lainnya sebagai peyedia data dukung dan implementasi sesuai dengan urusan masing masing			
		Kementerian PAN RB	Konsultasi dalam penilaian SPBE			
		Dunia Usaha/ Masyarakat	-			
2	Pembinaan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemda	OPD	Diskominfo sebagai PPID utama pemda Kabupaten Sukabumi memberikan pendampingan PPID pembantu (OPD di pemda Kab. Sukabumi) tentang pentingnya keterbukaan informasi publik	Meningkatnya jumlah Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	84 Perangkat Daerah	Bagi OPD : 1. Mendukung pencapaian kepatuhan terhadap ketentuan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik Bagi Kelompok sasaran : 1. Peningkatan Kesadaran PPID Pembantu akan pentingnya keterbukaan informasi public dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
		Masyarakat/ Dunia Usaha	-			
3	Pengelolaan Keluhan Masyarakat atas Layanan Pemda Kabupaten Sukabumi	Koordinator Pengelolaan Pengaduan	Inventarisasi permasalahan, pendisposisian aduan, pendampingan teknis dan pengelolaan aplikasi E-lapor Pemkab Sukabumi	Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	Pejabat Penghubung di 84 Perangkat Daerah	Bagi PD : 1. Mendukung kinerja pencapaian RPJMD 2. Mendukung pencapaian kinerja program informasi dan komunikasi publik Bagi Kelompok Sasaran : 1. Peningkatan kapasitas pejabat penghubung di Perangkat Daerah Pemda Kabupaten Sukabumi
		Kementerian PANRB	Konsultasi, Komunikasi dan Memberikan Bimtek Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N Lapor			
		Dunia usaha/ Masyarakat	-			

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

BAB IV Berisi :

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi
Peningkatan Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ini merupakan media informasi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel kepada publik sesuai dengan potensi dan nilai – nilai yang ada pada Dinas Komunikasi ,informatika dan Persandian. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi antara lain sebagai berikut :
 - a. Masih terdapat lokasi blankspot internet, sehingga pemanfaatan aplikasi menjadi sulit diakses oleh masyarakat wilayah blankspot internet;
 - b. Kesulitan mendapatkan data yang sesuai dengan prinsip satu data;
 - c. Belum terbentuknya Komitmen dan kepercayaan antar Perangkat Daerah terhadap Implementasi Satu Data Indonesia;
 - d. SDM yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik sangat terbatas;
 - e. Cakupan pelayanan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik sangat luas;

- f. Kurang dukungan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik terutama dalam pengembangan jaringan blankspot;
- g. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercukupi anggarannya sehingga dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dioptimalkan.

Berbagai permasalahan tersebut di atas tidak mengurangi kinerja dinas dan dapat dicari solusi pemecahannya melalui :

- a. Diskominfo melakukan intervensi penanganan blankspot area di 115 titik kabupaten sukabumi;
- b. DKIP memiliki portal website, Aplikasi Digital terintegrasi BIMA SAKTI yang telah dilakukan perbaharuan menjadi aplikasi KaMi Ada , WA Bot dan aplikasi Layanan Desa KaMi untuk dapat mengakomodir salah satunya adalah kebutuhan Satu Data;
- c. Diskominfo telah mengeluarkan peraturan tentang statistic sectoral
- d. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan;
- e. Penyediaan Akses Internet Gratis di ruang public;
- f. Pemanfaatan aplikasi E-Lapor yang responsive sebagai sarana menjawab keluhan masyarakat;
- g. Meningkatkan peranan Kominfo di wilayah serta peranan bidang Teknis dalam memberikan pelayanan di bidang kominfo di Kabupaten Sukabumi;
- h. Meningkatkan peran swasta, serta peranan dan dukungan masyarakat dalam pembangunan di bidang kominfo melalui pelaksanaan kegiatan secara bersama sama atau diikut sertakan;
- i. Menyampaikan kebutuhan Anggaran tidak terbatas pada APBD Kabupaten Sukabumi saja tetapi dapat bersumber dari pendanaan lain dan sumberdaya yang ada dengan pengoptimalan sebaik mungkin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. REKOMENDASI

Agar langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian maka, kami memberikan rekomendasi sebagai masukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Inovasi dalam menyelenggaraan pelayanan informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau aplikasi yang sudah terintegrasi sebagai upaya pelayanan pemerintahan yang mudah, murah, cepat dan transparan;
2. Menyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagai sarana prasarana pengamanan jaringan;
3. Pemberian sistem *barcode* dalam pelaksanaan Tanda Tangan Secara Elektronik agar dokumen yang sudah dilakukan TTE dapat tetap aman saat disebarluaskan secara *offline*;
4. Menyediakan informasi yang berkualitas dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
5. Meningkatkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam menyediakan, mengumumkan, mengelola dan melayani permintaan informasi publik;
6. Penguatan komitmen terhadap implementasi Satu Data Indonesia melalui penguatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai wali data.

Demikian laporan kinerja yang dapat kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 02 Januari 2024

Pt. KEPALA DINAS,



HERI SUKUMTRI SUBANDI, S.IP., M.Si

Pembina IV/a

NIP. 198004252008011003

LAMPIRAN